



**TERIMA
KASIH**

Booklet Hasil Survei Penilaian Integritas 2025



**BOOKLET
HASIL SPI
2025**



DAFTAR ISI

Bagian 1

Pendahuluan

Bagian 2

Demografi

Bagian 3

Potret Integritas
Nasional

Bagian 4

Highlight



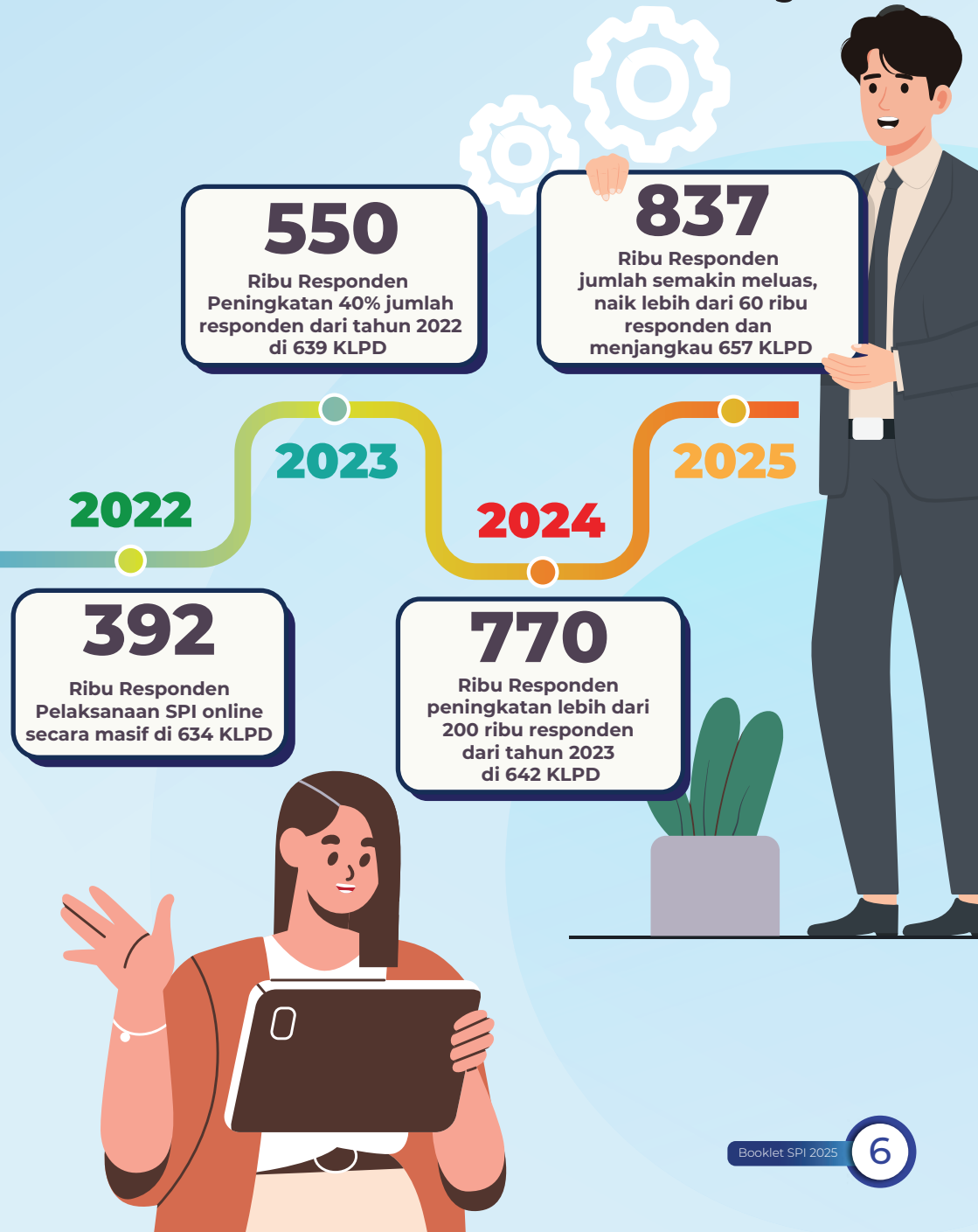
Bagian **1**

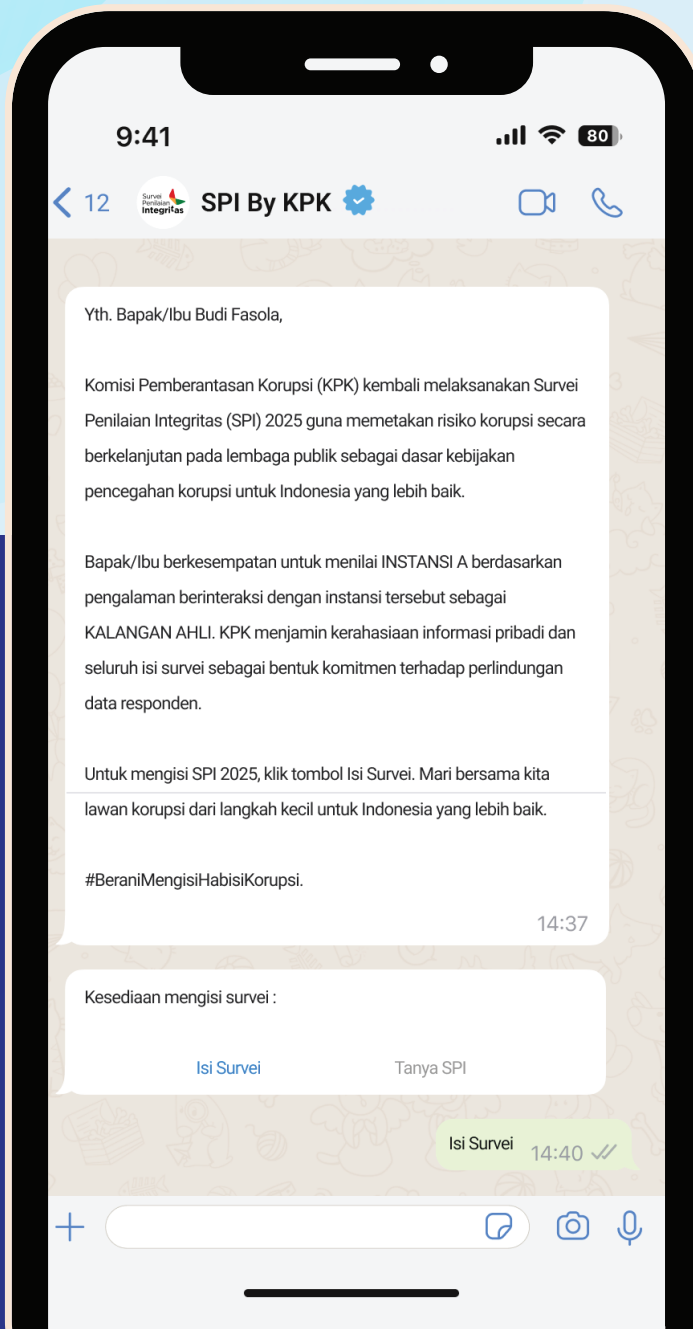
Pendahuluan

• • • •



Perjalanan SPI





Lima poin keunggulan SPI



1. Pengukuran

Kombinasi Persepsi, Pengalaman, dan Data Objektif (faktor koreksi).

2. Sensitivitas

Fokus pada hal-hal terkait pemberantasan korupsi, pemetaan risiko dan praktik korupsi, dan efektivitas kegiatan antikorupsi.

3. Peran Serta

Responden terdiri dari sudut pandang Internal (Pegawai), Eksternal (Penerima manfaat, pengguna layanan, dan Vendor) dan Eksper (*Stakeholder* atau ahli pemerhati dari KLPD).

4. Perbaikan

Identifikasi prioritas area perbaikan yang rentan korupsi. Hasil SPI memberikan rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

5. Transparan

Integritas setiap instansi sejak 2020 - 2025 disampaikan secara transparan melalui JAGA.ID.

Pemanfaatan SPI



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Indeks Integritas Nasional ditetapkan dalam RPJMN **2025-2029**, serta menjadi Program Prioritas Nasional berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Indeks Integritas Nasional berperan sebagai cermin integritas birokrasi demi memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN.



Sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang berintegritas tinggi, SPI dimanfaatkan sebagai referensi dalam penentuan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah yang menunjukkan progres positif atau berstatus hijau.

SPI Bukan Hanya Alat Ukur, Tapi Katalis Perbaikan.

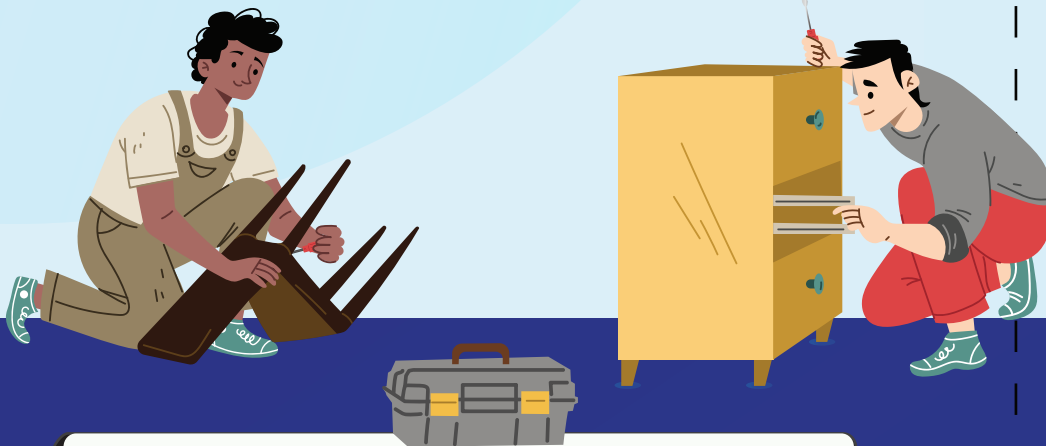


Ibarat garis meteran, SPI menunjukkan dengan presisi bagian mana yang sudah lurus, mana yang bengkok, dan seberapa jauh perbaikannya harus dilakukan. Namun, yang membuat perubahan itu benar-benar terjadi bukanlah meterannya, melainkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang menjadi proses membenahi rumah: memperkuat pondasi tata kelola, menambal kebocoran integritas, dan merapikan prosedur yang masih rawan.

Tahun 2026 akan menjadi tahun konsolidasi penuh bagi KPK dan seluruh instansi dalam menjalankan tindak lanjut yang lebih fokus, sistematis, dan terukur. Ini menjadi tahun ketika “rumah” yang telah diukur bersama mulai benar-benar direnovasi agar berfungsi lebih baik, lebih transparan, dan lebih tahan terhadap risiko korupsi.

SPI Sebagai Indikator Pengukuran atau Dampak (*Outcomes*)

• • • •



Survei Penilaian  **Integritas** | Indonesian  **Integrity** Index

- ▶ 8 Menu Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP)
- ▶ Sosialisasi / Kampanye
untuk meningkatkan pemahaman internal dan publik dalam upaya pencegahan korupsi serta penguatan integritas.
- ▶ Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
- ▶ Reformasi Birokrasi
- ▶ Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- ▶ Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Instansi

Individu

Survei Penilaian  **Integritas**

IPAK

oleh:



BADAN PUSAT STATISTIK

Siapa Saja yang Menilai?

.....



Internal

Pegawai di instansi
(ASN maupun non ASN)



Eksternal

Penerima manfaat, penerima layanan,
perijinan, mitra kerjasama, vendor
pengadaan & penunjukan langsung,
dan lainnya



Eksper

Stakeholder/ pemangku kepentingan/
kalangan ahli



Apa Saja yang Dinilai dari SPI?

Internal

01.

Transparansi

Kemudahan akses, jaminan penindakan korupsi sesuai aturan, serta keteladanan pimpinan.

02.

Integritas dalam Pelaksanaan Tugas

Aturan penggunaan fasilitas, instruksi dalam bekerja, kepatuhan terhadap prosedur, proses rekrutmen, promosi, dan mutasi berbasis merit.

05.

Perdagangan Pengaruh

Proses penentuan program dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan strategis.

03.

Pengelolaan pengadaan Barang & jasa dalam Pelaksanaan tugas

Proses, transparansi pengadaan, dan kualitas yang bermanfaat maksimal.

04.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Objektivitas promosi dan mutasi yang berbasis kompetensi.

06.

Pengelolaan Anggaran

Persepsi dan pengalaman terkait penyalahgunaan anggaran; mulai dari PBJ, perjalanan dinas, honor, hingga anggaran kantor.

07.

Sosialisasi Antikorupsi

Efektivitas sosialisasi, internalisasi, dan kampanye antikorupsi.



Eksternal

1 > Transparansi dan Keadilan Layanan

Pelayanan sesuai prosedur, adil, dan bebas diskriminasi

2 > Integritas Pegawai

Pencegahan praktik di luar ketentuan dalam pelayanan dan tugas



3 > Upaya Pencegahan Korupsi

Budaya antikorupsi dan kepatuhan di lingkungan kerja

Integritas Instansi

Penguatan integritas, transparansi untuk pencegahan korupsi, objektivitas kebijakan, penerapan pesan antikorupsi, pengawasan dan pendeteksian integritas.



Faktor Koreksi



Prevalensi Korupsi

Kasus korupsi di instansi

Integritas Pelaksanaan Survei

Kualitas data secara statistik, surveillance, serta kondisi intervensi jawaban responden



Partisipasi Instansi dalam Survei Penilaian Integritas



**SPI melibatkan 657 Kementerian,
Lembaga, BUMN, dan Pemerintah
Daerah**



48

Kementerian



59

Lembaga



4

BUMN



38

Pemerintah
Provinsi



93

Pemerintah
Kota



415

Pemerintah
Kabupaten

Cluster A

57 Instansi

30 Kementerian
23 Lembaga
4 BUMN



Cluster B

32 Instansi

7 Kementerian
25 Lembaga

Cluster C

22 Instansi

11 Kementerian
11 Lembaga



Cluster 1

122 Pemda

7 Pemerintah Provinsi
88 Pemerintah Kabupaten
27 Pemerintah Kota

Cluster 4

104 Pemda

8 Pemerintah Provinsi
81 Pemerintah Kabupaten
15 Pemerintah Kota

Cluster 2

80 Pemda

6 Pemerintah Provinsi
54 Pemerintah Kabupaten
20 Pemerintah Kota

Cluster 3

125 Pemda

6 Pemerintah Provinsi
98 Pemerintah Kabupaten
21 Pemerintah Kota

Cluster 5

115 Pemda

11 Pemerintah Provinsi
94 Pemerintah Kabupaten
10 Pemerintah Kota

Statistik Pelaksanaan SPI 2025

Data populasi “clean” yang dikirim ke KPK



5.154.103

Jumlah Responden yang Mengisi Kuesioner SPI



1.022.173



Responden dengan jawaban abnormal yang tidak dapat diolah



71.757

Responden tidak memenuhi syarat awal yang ditetapkan dalam SPI



112.723

Response Rate Nasional

18,56%

Response Rate Internal

39,91%

Undangan pengisian survei yang dikirim melalui Whatsapp maupun Email



4.422.120

Jumlah Responden yang Diolah Menjadi Indeks SPI



837.693



Internal

561.026

Eksternal

260.895

Eksper

15.772

Response Rate Eksternal

6,61%

Response Rate Eksper

42,05%



Mitra SPI

38 Perguruan Tinggi bekerjasama dengan KPK untuk studi kualitatif SPI 2025

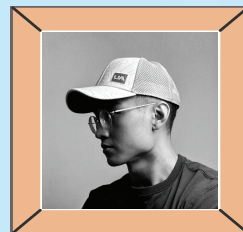
Tahun ini, SPI menggandeng **38 Perguruan Tinggi** di berbagai provinsi sebagai mitra pelaksana. Kehadiran Perguruan Tinggi memastikan proses studi kualitatif dapat dilakukan lebih dekat dengan konteks lokal, sehingga temuan yang dihasilkan lebih akurat, relevan, dan mencerminkan kondisi di masing-masing daerah. Melalui kolaborasi ini, proses penggalian informasi menjadi lebih menyeluruh karena dilakukan oleh pihak yang memahami dinamika regional, baik dari sisi sosial, budaya, maupun tata kelola layanan publik.

Pelaksanaan SPI diperkuat melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik dan kalangan akademisi yang berperan mempertajam aspek metodologis, sehingga proses pengukuran menjadi lebih terstandar, akurat, dan kredibel. Dengan dukungan keahlian statistik serta kajian ilmiah, setiap temuan SPI tidak hanya kuat secara empiris di lapangan, tetapi juga kokoh secara metodologis.



Key Opinion Leaders (KOL)

Pada SPI 2025, KPK menerapkan strategi komunikasi yang lebih progresif dengan melibatkan **Key Opinion Leaders (KOL)** dan **media partner**. KOL membantu mengemas isu integritas menjadi lebih dekat dan mudah diterima publik, sementara media partner memperluas jangkauan pesan secara konsisten. Kolaborasi ini membuat penyebaran informasi SPI lebih hidup, relevan, dan berdampak. Berikut adalah beberapa KOL yang bekerjasama dengan SPI 2025:



@raymondchins
TikTok
Posted - 23 September 2025



@jovialdalopez
IG Reels
Posted - 23 Oktober 2025



@dzawin_nur
IG Reels
Posted - 10 November 2025



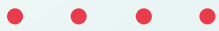
@salsaer
TikTok
Posted - 23 September 2025



@andovidalopez
IG Reels
Posted - 23 Oktober 2025



6 isu prioritas



Melalui pendekatan mendalam dengan berbagai pihak terkait—baik melalui wawancara langsung, Focus Group Discussion (FGD), maupun In-depth Interview (IDI), mitra Perguruan Tinggi menggali 6 isu prioritas yang menjadi fokus utama SPI. Pendekatan ini memastikan setiap temuan tidak hanya berdasarkan persepsi, tetapi juga menggambarkan dinamika nyata yang terjadi di daerah. Isu prioritas tersebut meliputi:

1. **Integritas Individu dan Kepemimpinan**
2. **Intervensi**
3. **Pelibatan dan Pengawasan oleh Pegawai dan Masyarakat**
4. **Penegakan dan Deteksi Dini Korupsi**
5. **Pengendalian Gratifikasi dan Suap**
6. **Transparansi pada Layanan Publik**

Kolaborasi ini dihadirkan untuk menyajikan potret integritas daerah yang jauh lebih utuh, tajam, dan akurat mengenai kondisi integritas dan mendorong rekomendasi perbaikan yang lebih tepat.



Kabar Baik...



Setiap tahun, jumlah responden SPI terus naik. Itu artinya, semakin banyak pihak yang peduli dan mau turun tangan menjaga integritas di Indonesia. Bahkan jika dibandingkan dengan 2021, jumlah responden melonjak signifikan.

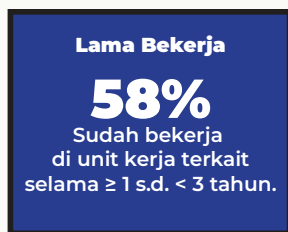
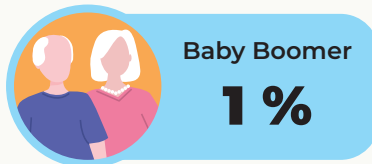
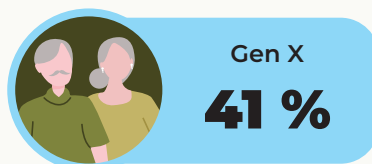
Sebuah Komitmen Bahwa Gerakan Antikorupsi Makin Mendapat Dukungan Luas!



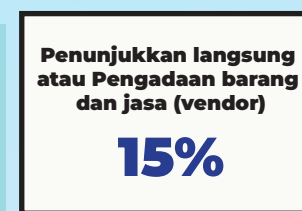
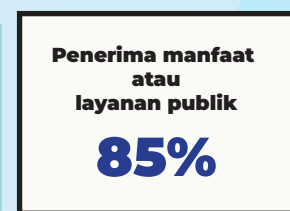
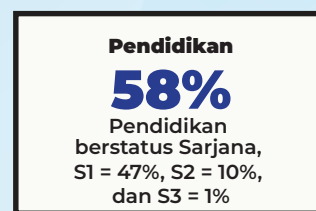
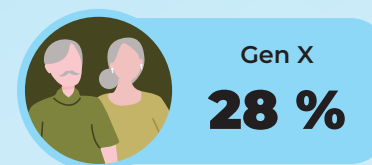
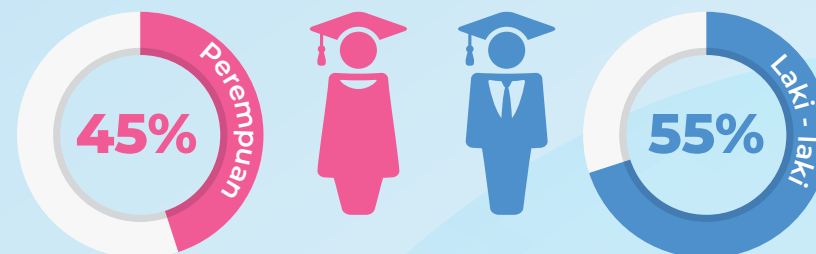


Demografi

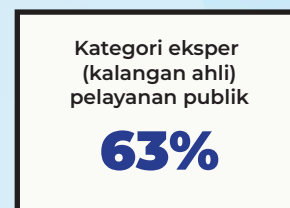
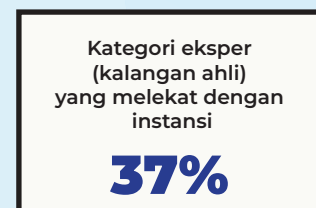
Internal



Eksternal



Eksper



Bagian 3

Potret Integritas Nasional



Potret Integritas Nasional 2025

Potret Integritas Nasional (I)

Kategori:

Rentan
(<73.00)

Waspada
(≥ 73.00 sampai <78.00)

Terjaga
(≥ 78.00)

Indek Integritas
Nasional Indonesia

72.32

Masih menunjukkan
Indonesia

RENTAN KORUPSI

Skala Integritas per Instansi

Rentan
(<73.00)

Waspada
(≥ 73.00 sampai <78.00)

Terjaga
(≥ 78.00)

Pemerintah Kabupaten dan Kota

82.26

Tertinggi
Pemerintah Kota Madiun

54.09

Terendah
Pemerintah Kabupaten
Lanny Jaya

Pemerintah Provinsi

79.41

Tertinggi
Pemerintah Provinsi
D.I. Yogyakarta

60.15

Terendah
Pemerintah Provinsi
Papua Barat

Kementerian & Lembaga

83.76

Tertinggi
Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia

63.55

Terendah
Mahkamah Agung

BUMN

79.71

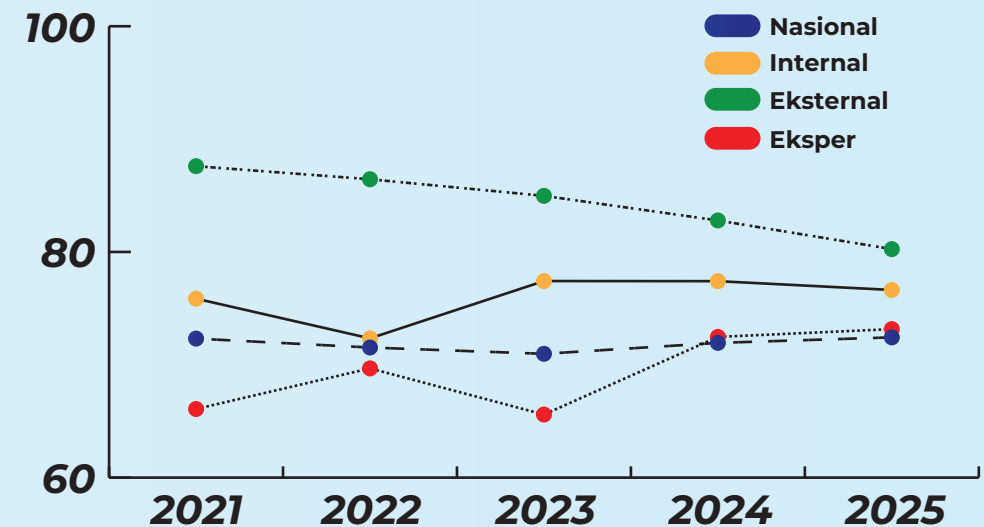
Tertinggi
Bank Tabungan Negara

67.96

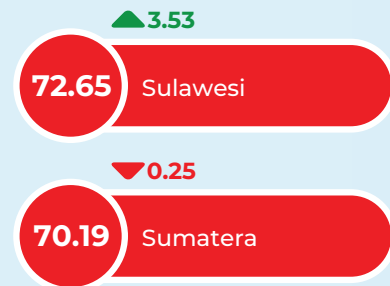
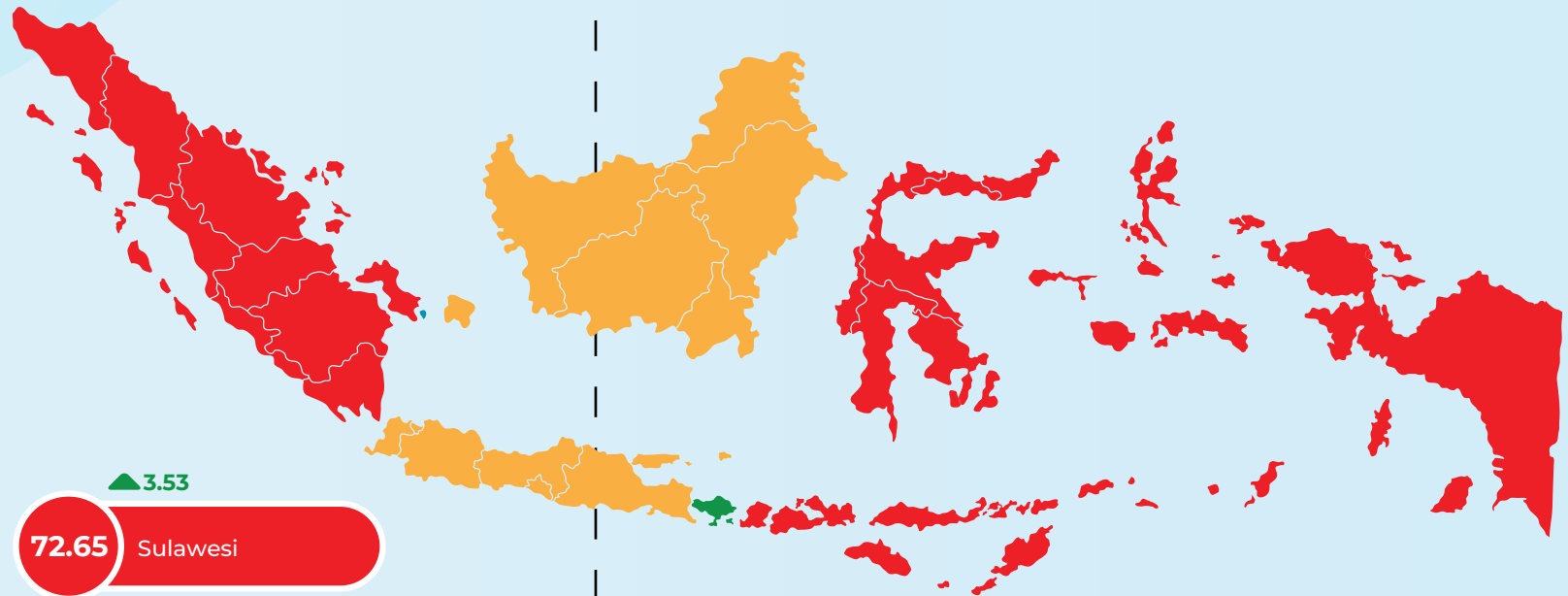
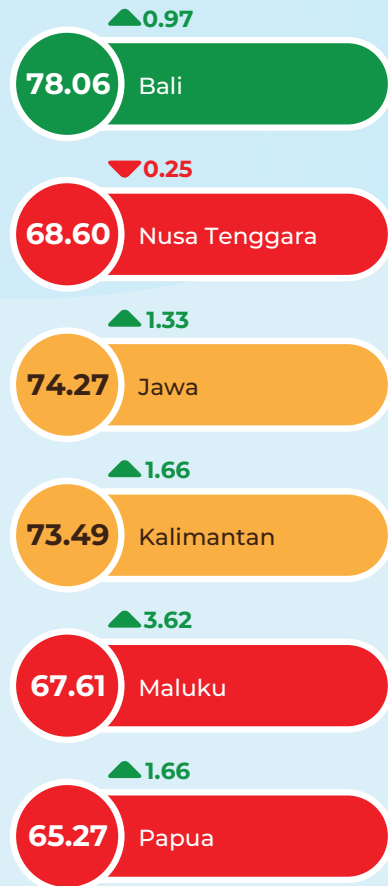
Terendah
Bank Rakyat Indonesia

Pelacakan Indeks Integritas Nasional, Internal, Eksternal, Eksper

Selama lima tahun berturut-turut,
Indeks Integritas Nasional tidak
pernah beranjak dari zona *rentan*



Indeks Integritas Wilayah di Indonesia



Potret Integritas Nasional (II)

Rentan
(<73.00)

Waspada
(≥ 73.00 sampai < 78.00)

Terjaga
(≥ 78.00)

Indeks per Tipe Kementerian

73.86

WASPADA

Tipe Besar

Pegawai : > 10.326 Orang

Anggaran : > 7.090 Miliar

76.31

WASPADA

Tipe Sedang

Pegawai : 496 s.d 10.326 Orang

Anggaran : 346 s.d 7.090 Miliar

79.71

Terjaga

Tipe Kecil

Pegawai : < 496 Orang

Anggaran : < 346 Miliar

Indeks per Tipe Lembaga

76.37

WASPADA

Tipe Besar

Pegawai : > 3.978 Orang

Anggaran : > 2.450 Miliar

78.38

Terjaga

Tipe Sedang

Pegawai : 295 s.d 3.978 Orang

Anggaran : 74,7 Miliar s.d 2.450 Miliar

77.05

WASPADA

Tipe Kecil

Pegawai : < 295 Orang

Anggaran : $< 74,7$ Miliar

Potret Integritas Nasional (II)

Rentan
(<73.00)

Waspada
(≥ 73.00 sampai < 78.00)

Terjaga
(≥ 78.00)

Indeks Integritas Bidang
Kementerian/Lembaga
Berdasarkan Mitra Komisi DPR

Bidang perdagangan dan pengawasan persaingan usaha berada di posisi paling **rentan**, menggambarkan lemahnya kontrol terhadap proses perizinan, pengawasan distribusi, dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengaturan pasar.

Indeks per Tipe Kementerian

80.47

Badan Anggaran

Seluruh Kementerian Koordinator

79.56

Komisi VII

Bidang: Perindustrian dan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif, Sarana publikasi

79.52

Komisi XI

Bidang: Keuangan dan moneter, Perencanaan Pembangunan nasional, Sektor jasa keuangan

78.49

Komisi XII

Bidang: Energi dan sumber daya mineral, Lingkungan hidup, Investasi

77.63

Komisi I

Bidang: Pertahanan, Luar Negeri, Informatika

Potret Integritas Nasional (II)

Rentan
(<73.00)

Waspada
(≥ 73.00 sampai < 78.00)

Terjaga
(≥ 78.00)

77.45

Komisi XIII

Bidang: Regulasi reformasi dan HAM

76.63

Komisi IX

Bidang: Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial

76.53

Komisi VIII

Bidang: Agama, Sosial, Perempuan dan Anak

76.42

Komisi X

Bidang: Pendidikan, Olahraga, Sains dan Teknologi

75.91

Komisi III

Bidang: Penegakan Hukum

75.81

Komisi II

Bidang: Pemerintahan dalam negeri, Pertanahan, Pemberdayaan aparatur

75.20

Komisi V

Bidang: Infrastruktur dan Perhubungan

74.82

Komisi IV

Bidang: Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

72.78

Komisi VI

Bidang: Perdagangan, Kawasan perdagangan, Pengawasan persaingan usaha dan BUMN

Potret Integritas Nasional (III)

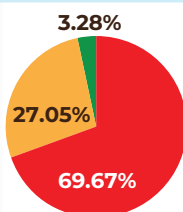
Rentan
(<73.00)

Waspada
(≥ 73.00 sampai < 78.00)

Terjaga
(≥ 78.00)

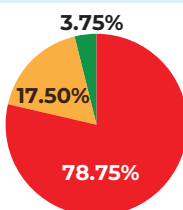
Indeks per Wilayah

Cluster
1



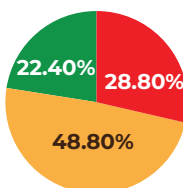
Aceh, Bengkulu, Jambi, Kepri, Riau, Sumbar, Sumut

Cluster
2



Banten, DKI Jakarta, Jabar, Kep. Babel, Lampung, Sumsel

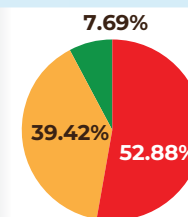
Cluster
3



Yogyakarta, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalsel, Kalteng

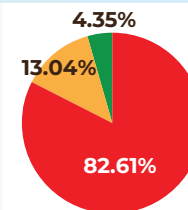


Cluster
4



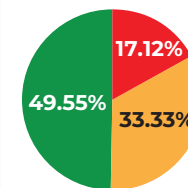
Gorontalo, Kaltim, Kaltara, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut

Cluster
5



Bali, Maluku, Maluku, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah

Cluster
6



111 Kementerian/Lembaga/BUMN

Indeks per Tipe Provinsi

70.17

RENTAN

Tipe Besar

Pegawai : 6.42 s.d 19.85 ribu
Anggaran : 10.8 s.d 81.73 triliun

68.60

RENTAN

Tipe Sedang

Pegawai : 1.13 s.d 7.04 ribu
Anggaran : 2.58 s.d 20.1 triliun

68.51

RENTAN

Tipe Kecil

Pegawai : 0.99 s.d 2.79 ribu
Anggaran : 1.53 s.d 2.95 triliun

Indeks per Tipe Kota

72.04

RENTAN

Tipe Besar

Pegawai : 2.1 s.d 4.51 ribu
Anggaran : 2.39 s.d 12.14 triliun

73.66

RENTAN

Tipe Sedang

Pegawai : 1.01 s.d 2.59 ribu
Anggaran : 0.58 s.d 4.67 triliun

73.69

WASPADA

Tipe Kecil

Pegawai : 0.93 s.d 1.25 ribu
Anggaran : 0.57 s.d 0.94 triliun

Indeks per Tipe Kabupaten

70.70

RENTAN

Tipe Besar

Pegawai : 1.9 s.d 5.58 ribu
Anggaran : 2.44 s.d 11.5 triliun

71.12

RENTAN

Tipe Sedang

Pegawai : 0.01 s.d 3.59 ribu
Anggaran : 0.73 s.d 4.97 triliun

71.50

RENTAN

Tipe Kecil

Pegawai : 0.41 s.d 1.18 ribu
Anggaran : 0.59 s.d 1.11 triliun

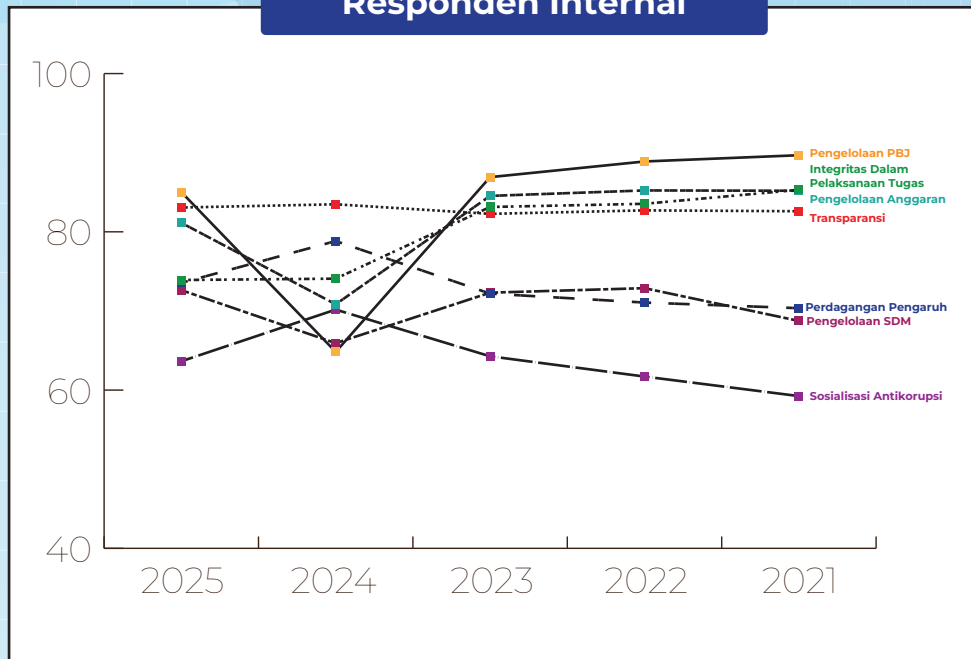
Dimensi SPI dan Pelacakan Indeks 2021-2025

Rentan
(<73.00)

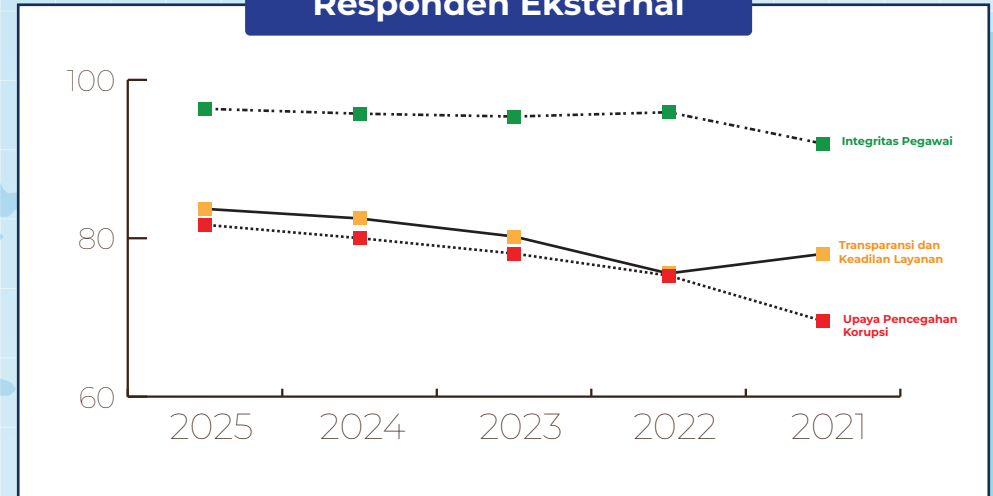
Waspada
(≥ 73.00 sampai < 78.00)

Terjaga
(≥ 78.00)

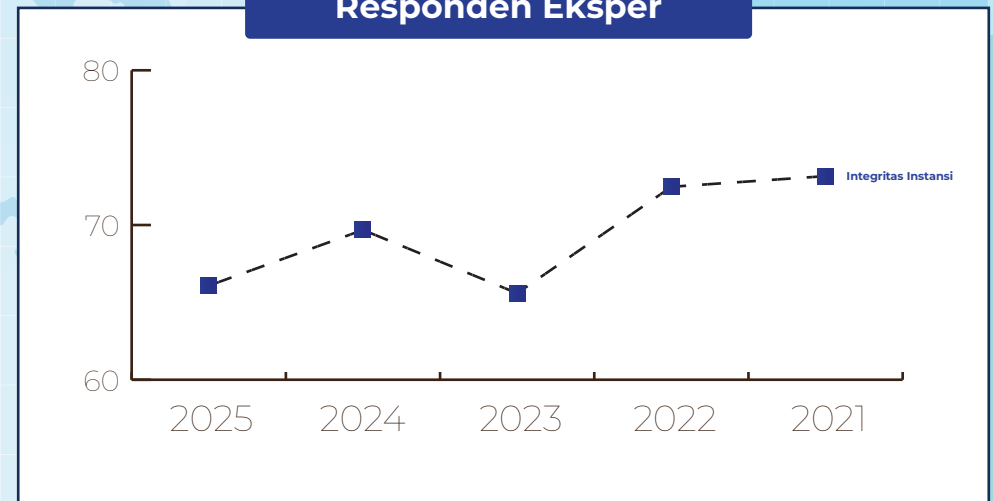
Responden Internal



Responden Eksternal



Responden Ekspert



Indeks Integritas per Dimensi pada Setiap Tipe Instansi

Rentan
(<73.00)

Waspada
(≥73.00 sampai < 78.00)

Terjaga
(≥78.00)

Menurut responden internal, Sosialisasi Antikorupsi, Pengelolaan SDM, Integritas dalam Pelaksanaan Tugas, dan Perdagangan Pengaruh berada pada area RENTAN dan memerlukan atensi tindak lanjut yang lebih nyata.

Responden Internal

	BUMN	Kementerian	Lembaga	Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kota	Pemerintah Provinsi
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	77,27 ^{+3,54}	78,82 ^{+3,18}	79,46 ^{+5,03}	73,01 ^{+0,75}	73,91 ^{+0,97}	68,51 ^{+1,92}
Pengelolaan Anggaran	86,10 ^{+6,09}	85,46 ^{+9,80}	85,84 ^{+10,54}	80,07 ^{+10,48}	81,90 ^{+9,82}	77,71 ^{+9,92}
Pengelolaan PBJ	89,67 ^{+17,03}	88,80 ^{+22,90}	88,68 ^{+27,20}	84,18 ^{+19,39}	85,69 ^{+19,89}	81,61 ^{+19,94}
Perdagangan Pengaruh	80,64 ^{+7,42}	79,25 ^{+5,35}	78,93 ^{+5,84}	72,17 ^{+5,37}	73,89 ^{+5,24}	71,40 ^{+4,76}
Pengelolaan SDM	75,51 ^{+0,37}	77,60 ^{+5,44}	77,24 ^{+5,43}	71,80 ^{+6,87}	72,78 ^{+7,32}	67,62 ^{+6,19}
Transparansi	86,50 ^{+3,48}	86,00 ^{+0,52}	86,03 ^{+0,58}	82,29 ^{+0,36}	83,79 ^{+0,34}	81,08 ^{+0,65}
Sosialisasi Antikorupsi	77,28 ^{+2,83}	72,71 ^{+4,98}	73,74 ^{+4,77}	61,03 ^{+7,23}	64,70 ^{+6,07}	61,04 ^{+6,11}

Responden Eksternal

	BUMN	Kementerian	Lembaga	Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kota	Pemerintah Provinsi
Integritas Pegawai	97,54 ^{+0,39}	97,35 ^{+0,07}	97,91 ^{+0,58}	96,11 ^{+0,57}	96,33 ^{+1,22}	95,21 ^{+0,31}
Upaya Pencegahan Korupsi	83,36 ^{+5,75}	84,94 ^{+1,53}	84,18 ^{+1,16}	80,88 ^{+2,25}	82,38 ^{+1,51}	80,89 ^{+3,26}
Transparansi dan Keadilan Layanan	85,50 ^{+3,43}	84,80 ^{+0,59}	84,12 ^{+0,46}	83,53 ^{+1,19}	84,07 ^{+2,61}	86,29 ^{+2,42}

Responden Ekspert

	BUMN	Kementerian	Lembaga	Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kota	Pemerintah Provinsi
Integritas Instansi	74,05 ^{-11,43}	70,42 ^{-9,33}	72,22 ^{-9,18}	64,79 ^{-2,71}	66,90 ^{-2,95}	62,42 ^{-1,00}



#Faktanya...



Generasi mana sih yang menghadapi risiko korupsi paling bikin geleng-geleng kepala tahun ini?
(Spoiler: Gen Z beda sendiri!)

Gen Z



Risiko 23% mengemuka:
muncul persepsi bahwa
pejabat masih
memanfaatkan anggaran
kantor untuk urusan pribadi.

Gen X, Y, dan Baby Boomer

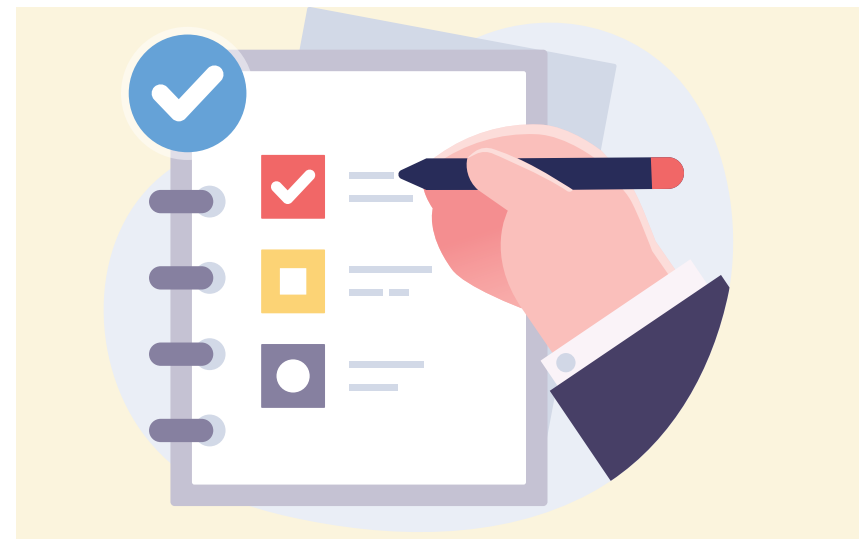


Menyatakan bahwa ada
risiko 35%-38% keputusan
dalam pelaksanaan tugas
masih dipengaruhi oleh
kedekatan suku, agama,
keluarga, atau almamater.

Bagian 4

Highlight

.....



Highlight Internal

Integritas dalam Pelaksanaan Tugas

Fasilitas kantor jadi 'serbaguna & milik pribadi'?

58%

pegawai memakainya untuk kepentingan pribadi **tanpa kecuali**, semua generasi ikut ambil bagian.

Integritas dalam Pelaksanaan Tugas

Keberadaan gratifikasi dalam promosi & mutasi

14%

Pengelolaan SDM

Kondisi ini menunjukkan bahwa integritas dalam pelaksanaan tugas masih RENTAN. Situasi seperti ini tidak hanya memengaruhi keadilan dan kesempatan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang mempengaruhi semangat kerja dan rasa saling percaya pegawai.

Keberadaan **Nepotisme** Dalam Promosi & Mutasi



32%

Hubungan
Kekerabatan



33%

Kedekatan
dengan
Pejabat



23%

Kesamaan
Almamater/
Golongan/
Organisasi

Pengelolaan Anggaran



Pegawai mulai kehilangan kepercayaan terhadap ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran:

20%

Indikasi adanya pejabat yang menggunakan **anggaran kantor** untuk kepentingan pribadi

11%

Indikasi adanya penyalahgunaan **anggaran dalam proses PBJ**

11%

Indikasi adanya pegawai yang membuat kuitansi, biaya transportasi, dan biaya lain dalam **perjalanan dinas** tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

10%

Indikasi adanya pegawai yang menerima **honor/uang transport lokal/perjalanan dinas** tidak sesuai dengan pertanggungjawaban yang ditandatangani

Bahkan para ahli menilai, ada risiko hingga 32% terkait rendahnya kualitas transparansi anggaran di instansi pemerintah. Perlu diingat, **1 is too many** untuk praktik korupsi!

Pengelolaan PBJ

Di 2025, risiko dalam pengelolaan PBJ masih menonjol. Isu pemilihan yang diatur, kualitas barang yang kurang sesuai, hingga kedekatan pemenang dan vendor tetap jadi perhatian. Hasil pengadaan juga dinilai belum optimal, **menunjukkan perlunya pengawasan** yang lebih kuat.

Pemilihan diatur

42%

Kualitas barang tidak sesuai

44%

Pemenang punya hubungan kekerabatan

44%

Vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait

38%

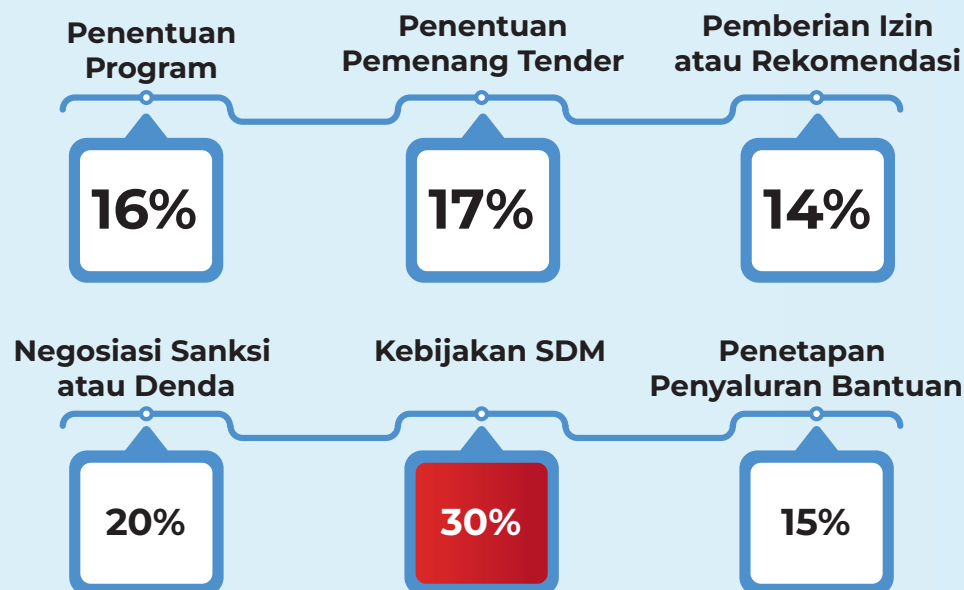
Hasil pengadaan tidak memberikan manfaat

41%



Perdagangan Pengaruh

Dimensi Perdagangan Pengaruh, terlihat bahwa intervensi pihak luar masih cukup dominan dalam berbagai proses pengambilan keputusan di pemerintah daerah. Secara khusus, terkait kebijakan SDM menunjukkan peningkatan **sebesar 20%** dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10% untuk pengaruh pihak luar terhadap keputusan terkait rekrutmen pegawai non-ASN, promosi, rotasi, mutasi, dan diklat pegawai, menandakan bahwa aspek pengelolaan SDM merupakan area yang paling rentan terhadap praktik perdagangan pengaruh.



Sosialisasi Antikorupsi 2 dari 5

pegawai menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait **pelaporan gratifikasi**. Jumlah yang sama juga belum memperoleh **sosialisasi mengenai pelaporan suap**.

Bahkan, 1 dari 2

pegawai mengaku belum mendapatkan sosialisasi terkait **pelaporan tindak pidana korupsi yang mereka lihat, dengar, atau ketahui**.

Jangan biarkan pegawai berjalan tanpa kompas dalam melawan korupsi!

Transparansi

Dari perspektif internal, integritas dinilai cukup kuat: 90% pegawai melihat pelaku korupsi diproses sesuai ketentuan, 93% menilai pimpinan memberi teladan pencegahan korupsi, dan 94% merasakan hal yang sama dari atasan langsung. Temuan ini menunjukkan budaya antikorupsi sudah mulai diterapkan secara nyata dan kongkrit di level organisasi.

Persepsi pelaku korupsi diproses sesuai ketentuan

90%

Pengalaman teladan pencegahan korupsi dari pimpinan

93%

Pengalaman teladan pencegahan korupsi dari atasan langsung

94%

Highlight Eksternal

Transparansi dan Keadilan Layanan



Tren lima tahun menunjukkan pola yang sama dan belum ada perubahan nyata: risiko tinggi! Hal ini mengindikasikan bahwa alur pelayanan publik masih kompleks, informasi layanan belum tersampaikan dengan jelas, dan prosedurnya masih sulit diikuti.

“Bayangan: lima tahun berlalu, tapi risikonya tetap tinggi. Artinya satu hal—alur pelayanan publik kita masih ribet, informasinya nggak jelas, dan prosedurnya bikin orang nyerah duluan.”

Integritas Pegawai

Fakta bahwa penerima layanan masih diminta memberikan uang, barang, atau fasilitas tidak resmi menunjukkan bahwa praktik ini belum benar-benar terkendali. Kondisi ini patut menjadi alarm serius, mengingat level risikonya tetap bertahan pada level sedang.



Upaya Pencegahan Korupsi

22% risiko yang muncul akibat belum tersedianya media pengaduan, pelaporan masyarakat, serta tidak ada perlindungan bagi pelapor korupsi



24% risiko akibat tidak adanya kampanye atau himbauan antikorupsi =
CELAH BESAR
yang dapat membuka ruang terjadinya korupsi.



#Faktanya....

Bukan Suap, Katanya... Cuma 'Sungkan'.

Sebanyak **22%** pengguna layanan inisiatif mengaku pernah memberikan sesuatu kepada petugas sebagai bentuk 'terima kasih', rasa sungkan, atau untuk menjaga relasi. Padahal, tindakan ini jelas tidak sesuai ketentuan. Yang mengejutkan, justru Gen Z—kelompok yang dikenal kritis dan melek aturan—menjadi pelaku tertinggi praktik ini.

WHY
Oh
WHY?

#Faktanya....

Persepsi Intervensi Eksternal Tembus 30% dalam Setahun!

Persepsi adanya pihak luar yang ikut mempengaruhi keputusan kepegawaian melonjak dari 10% di 2024 menjadi 30% di 2025. Kenaikan tajam ini menunjukkan bahwa isu yang dulu hanya terdengar sebagai “bisik-bisik”, kini mulai muncul sebagai **perhatian nyata di lingkungan pegawai.**



Highlight Ekspert

Para ahli menegaskan bahwa pekerjaan rumah untuk memperkuat integritas masih sangat besar dan banyak celah belum tertutup dan perbaikan masih jauh dari kata selesai.

	2021	2022	2023	2024	2025
Praktik Suap	sedang	sedang	sangat tinggi	sedang	sangat tinggi

	2021	2022	2023	2024	2025
Praktik Pungli	sedang	sedang	sangat tinggi	sedang	sangat tinggi

Setelah sempat mereda di level Sedang pada 2024, praktik suap dan pungli justru kembali menanjak ke kategori **Sangat Tinggi** di 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa layanan publik bukan hanya rentan, tetapi kini berada dalam kondisi yang semakin rawan dan membutuhkan intervensi serius.

	2021	2022	2023	2024	2025
Konflik Kepentingan	tinggi	sedang	sangat tinggi	rendah	sangat tinggi

Risiko berada pada level **Sangat Tinggi** kembali melonjak di 2025, mencerminkan bahwa mekanisme pencegahan konflik kepentingan belum benar-benar membumi, masih di awang-awang.

	2021	2022	2023	2024	2025
Transparansi Layanan Publik	tinggi	tinggi	sangat tinggi	sedang	sangat tinggi

	2021	2022	2023	2024	2025
Intervensi Pihak Lain	tinggi	tinggi	sangat tinggi	sedang	sangat tinggi

	2021	2022	2023	2024	2025
Kualitas Transparansi Anggaran	tinggi	tinggi	sangat tinggi	sedang	sangat tinggi

	2021	2022	2023	2024	2025
Kualitas Transparansi dan Akuntabilitas PBJ	tinggi	tinggi	sangat tinggi	sedang	sangat tinggi

Indikator transparansi dan intervensi berada pada **Sangat Tinggi**, menegaskan bahwa upaya keterbukaan belum cukup kuat untuk menahan tekanan intervensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi yang diterapkan belum konsisten, belum mengakar, dan belum mampu menghasilkan perubahan yang benar-benar bertahan.

	2021	2022	2023	2024	2025
Objektivitas Kebijakan Manajemen SDM	tinggi	tinggi	tinggi	sedang	sangat tinggi

	2021	2022	2023	2024	2025
Kemampuan Mendeteksi Korupsi Internal	tinggi	tinggi	tinggi	sedang	sangat tinggi

Objektivitas kebijakan SDM dan kemampuan mendeteksi korupsi internal masih mandek tanpa perbaikan berarti. Risiko tetap tinggi, menandakan bahwa sistem pengendalian belum bekerja efektif dan titik rawan korupsi masih terbuka lebar.



	2021	2022	2023	2024	2025
Penerapan Pesan-pesan Antikorupsi	tinggi	tinggi	tinggi	sedang	tinggi

Integritas Pegawai	tinggi	tinggi	sangat tinggi	tinggi	sangat tinggi
---------------------------	--------	--------	---------------	--------	---------------

Keduanya terus stagnan pada risiko tinggi–sangat tinggi, mencerminkan bahwa budaya integritas belum benar-benar terbentuk, baik di level individu maupun di tingkat organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai integritas belum menjadi kebiasaan, belum mengakar, dan belum mampu mendorong perubahan perilaku secara nyata.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi	tinggi	sedang	sangat tinggi	rendah	sangat tinggi
---	--------	--------	---------------	--------	---------------

Risiko keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi cenderung tinggi, menunjukkan rapuhnya partisipasi publik dan lemahnya kolaborasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.

#Faktanya....

Apa kata Ekspert yang paling menonjol tahun ini?

Pandangan para ahli melonjak dari **18% (2024)** ke **65% (2025)** dalam melihat potensi intervensi pihak lain. Lonjakan ini menunjukkan kewaspadaan yang jauh lebih tinggi terhadap campur tangan pihak lain tahun ini sebanyak **47%.**



#Faktanya...

Apa kata Eksper yang paling menonjol tahun ini?



Pandangan para ahli melonjak dari 18% (2024) ke 65% (2025) dalam melihat potensi **intervensi pihak lain**. Lonjakan ini menunjukkan kewaspadaan yang jauh lebih tinggi terhadap campur tangan pihak lain tahun ini sebanyak **47%**.

Highlight Renaksi Tindak Lanjut

Eitsss, tidak semua yang disampaikan SPI bernilai negatif kok—justru ada kabar baik di baliknya. SPI bukan hanya memotret kondisi integritas, tetapi juga menghadirkan rekomendasi nyata untuk perbaikan. Rekomendasi tersebut telah dituangkan ke dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL), yang menjadi pijakan penting untuk memastikan setiap pemangku kepentingan terus bergerak, memantau komitmen, dan memperkuat sistem integritas di lembaganya masing-masing.

Yang lebih menggembirakan, pada tahun 2025 agenda ini mulai berjalan secara lebih sistematis dan menyeluruh, dengan progres perbaikan yang terlihat semakin nyata dan signifikan. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat komitmen instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi SPI—baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga/BUMN. Data berikut menunjukkan bagaimana mayoritas instansi bukan hanya menyatakan komitmen, tetapi juga benar-benar bergerak, memperbaiki area rentan, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana korupsi.



Pemerintah
Daerah

99%

536 dari 543

Kementerian,
Lembaga, dan BUMN

99%

103 dari 104

Mayoritas instansi benar-benar berkomitmen memperbaiki area yang rentan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana korupsi

84%

456 dari 543

94%

98 dari 104

Sebagian besar instansi serius dan berkomitmen. Dibuktikan dengan penyampaian renaksi dan dokumen pendukung yang tepat waktu

90%

86%

Rata-rata kelengkapan data dukung yang diberikan, dari seluruh instansi yang menyusun RTL.